

ISBN 978-623-6523-69-8 (PDF)



Dr. Romli Arsad, SH., M.Hum.

HUKUM DAN PERAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 8

- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM DAN PERAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

Dr. Romli Arsad, S.H., M.Hum.

ALQAPRINT JATINANGOR

Cakrawala Baru Dunia Buku



ALQA

35.14.077

*Hukum dan Peran Koperasi
dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*

© Dr. Romli Arsad, S.H., M.Hum.

Penyunting, Adnan Abi Wildan
Cover & Setting, Adlhan 'Ojo' Nury MASA

ISBN Buku Cetak

978-979-9462-76-3

Tahun Terbit Cetak: 2016

ISBN Buku Elektronik (Digital)

978-623-6523-69-8 (PDF)

Tahun Terbit Digital: 2020

Diterbitkan oleh

ALQAPRINT JATINANGOR - Anggota Ikapi

Nomor 006/JBA/99

Jalan Cibeusi I Bojongjeureun No. A47

Kawasan Pendidikan Jatinangor

Telp. (022) 877 06 068 - 081 31 22 47 263

Sumedang 45363/Bandung 40600

e-mail: alqaprint@yahoo.co.id

alqaprintjatinangor@gmail.com

NPWP: 01.745.881.1-446.000

PKP: S-159PKP/WPJ.1503/2021

NIB: 261021 0021403 0004

KATA PENGANTAR

Puji dan sujud syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya buku HUKUM DAN PERAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN atas segala segala bantuan dan dorongannya, juga AlqaPrint Jatinangor yang telah berusaha keras agar buku yang sebelumnya merupakan disertasi dengan judul “Pendekatan Yuridis Normatif Mengenai Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Kajian Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian” yang telah dipertahankan pada 2010 lalu, pada Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini dapat diterbitkan.

Buku ini membahas tentang landasan hukum koperasi, selanjutnya menjawab tentang teori dan konsep peran koperasi dalam pembangunan ekonomi yang sampai saat ini masih terkendala dan juga bagaimana mencari solusi penyelesaiannya. Buku ini berupaya menggambarkan adanya potensi keragaman pemahaman terhadap koperasi, sebagai konsekuensi dari konstruksi koperasi yang terkadang mendasarkan organisasi pada nilai-nilai lokal yang berkembang pada masyarakat. Keragaman pemahaman tersebut pada akhirnya turut memengaruhi regulasi koperasi pada suatu negara. Dengan demikian, keberhasilan atau ketidakberhasilan koperasi selalu berkaitan dengan regulasi yang mengakomodir keberadaan dan peran koperasi. Pada sisi lain, perkembangan pergaulan internasional telah memunculkan organisasi gerakan koperasi internasional bernama *International Cooperative Alliance (ICA)*, yang berupaya menjadi jembatan dan penggagas agar koperasi di seluruh dunia semakin bermanfaat bagi masyarakat. *ICA* berupaya mengelaborasi nilai-nilai lokal agar dapat dikembangkan sebagai nilai-nilai universal, dan sebaliknya *ICA* juga menyosialisasikan nilai-nilai universal agar dapat dipergunakan bagi pengembangan koperasi nasional.

Kontribusi koperasi di dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara, telah melahirkan pertanyaan parametris: “Seberapa besar kontribusi koperasi di dalam *Gross National Product* atau *GNP*.” Semakin besar kontribusi koperasi terhadap *GNP*, dapat dijadikan indikator besarnya peran koperasi dalam pembangunan perekonomian. Kegagalan koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, di

antaranya ditengarai karena belum terwujudnya konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horisontal dalam mendukung keberadaan dan peran koperasi.

Dengan terbitnya buku ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., M.M., Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H.,M.H., Prof. Dr. H. Khasan Effendy, M.Pd., Dr. Pan Lindawaty Sewu, S.H., M.Hum., Dr. Iur. Liona Nanang Supriyatna, S.H., M.Hum., yang telah memberikan bantuan, bimbingan dengan penuh kesabaran dan telah memberikan petunjuk, arahan, dan masukan-masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan buku ini. Penulis sebagai kepala rumah tangga dan suami secara khusus sampaikan terima kasih dan peluk cium yang setulus-tulusnya kepada istri tercinta Ely Rosmiati, S. Sos, serta anak-anakku tersayang Drg. Printzdhan Wilovo Romel dan Elsa Maretha Putri Romel, S.IP yang dengan setia sabar menunggu, mendorong, mendukung, dan membantu dalam proses penyelesaian buku ini.

Penulis berharap agar buku ini tidak hanya berguna bagi penulis, akan tetapi dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perkoperasian dan aspek hukum tata pemerintahan, sehingga menjadi sumbangan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tercinta yang saat ini sedang mengalami permasalahan dalam pembangunan ekonomi.

Akhir kata, tak ada yang sempurna karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah SWT. Sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan buku ini, penulis harapkan sumbang saran dari pembaca sekalian.

Penulis,

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | v | |
| DAFTAR ISI | vii | |
| BAB I | KONDISI UMUM HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA..... | 1 |
| A. | Pengantar | 1 |
| B. | Pemahaman terhadap Peran dan Kelembagaan Koperasi di dalam Kerangka Pemikiran | 10 |
| 1. | Kerangka Teoretis | 11 |
| a. | Teori Kemanfaatan Hukum..... | 11 |
| b. | Teori Hukum Sarana Pembangunan | 13 |
| c. | Teori Ekonomi Kerakyatan..... | 15 |
| 2. | Kerangka Konseptual | 18 |
| a. | Konsep Ekonomi Koperasi | 19 |
| b. | Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan | 20 |
| c. | Perundang-Undangan Perkoperasian | 22 |
| BAB II | SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI | 25 |
| A. | Pengantar | 25 |
| B. | Sistem Perundang-Undangan Koperasi | 26 |
| 1. | UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian . | 26 |
| 2. | UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | 27 |
| 3. | UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah..... | 28 |
| 4. | UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)..... | 28 |
| 5. | PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi | 29 |
| 6. | PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah..... | 29 |

| | | |
|---------|---|----|
| 7. | PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi... | 29 |
| 8. | PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi..... | 29 |
| 9. | Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian | 30 |
| C. | Pembangunan Ekonomi..... | 30 |
| 1. | Perkembangan Perekonomian yang Dilakukan Tanpa Eksploitasi..... | 31 |
| 2. | Perkembangan Perekonomian dengan Apresiasi Keberagaman..... | 31 |
| 3. | Perkembangan Perekonomian dan Otonomi Perekonomian..... | 32 |
| D. | Orientasi Pembangunan Ekonomi Indonesia | 34 |
| E. | Struktur Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi..... | 36 |
| F. | Struktur Ekonomi Indonesia | 40 |
| G. | Pembangunan Berkelanjutan | 43 |
| H. | Hambatan Pembangunan Ekonomi Indonesia | 44 |
| | | |
| BAB III | HUKUM TATA PEMERINTAHAN DAN KOPERASI | 49 |
| A. | Pengantar | 49 |
| B. | Norma Kewenangan Pemerintah | 50 |
| | | |
| BAB IV | PERAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI | 53 |
| A. | Pengantar | 53 |
| B. | Perkoperasian di Tengah Perekonomian Indonesia .. | 54 |
| 1. | Perekonomian Indonesia Sebelum 1966 | 55 |
| 2. | Perekonomian Indonesia 1966 – 1968..... | 56 |
| 3. | Perekonomian Indonesia Era Pembangunan Jangka Panjang I..... | 57 |
| a. | Kronologi Pelita | 57 |
| b. | Beberapa Aspek Pembangunan Jangka Panjang I | 58 |
| 4. | Perekonomian Indonesia Era Pembangunan Jangka Panjang II | 61 |
| C. | Varian Konsep Kelembagaan Koperasi | 64 |

| | | |
|----------|--|-----|
| BAB V | KOPERASI DALAM DISKURSUS GERAKAN KOPERASI..... | 71 |
| | A. Pengantar | 71 |
| | B. Koperasi di Antara Faham Liberal dan Sosialis | 71 |
| | C. Koperasi dan Gerakan ICA | 74 |
| | D. Corak Hubungan di Dalam Koperasi | 81 |
| | 1. Hubungan Kepemilikan | 81 |
| | 2. Hubungan Pelayanan | 83 |
| | 3. Hubungan Pasar | 84 |
| BAB VI | KOPERASI DALAM DISKURSUS TEORI EKONOMI..... | 91 |
| | A. Pengantar | 91 |
| | B. Memahami Pelaku di Dalam Koperasi..... | 93 |
| | 1. Anggota Koperasi | 93 |
| | 2. Manajemen Koperasi | 94 |
| | 3. Dinamika Keunggulan Koperasi..... | 95 |
| | a. Skala Ekonomi | 95 |
| | b. Kompetisi (<i>Competition</i>)..... | 96 |
| | c. Lingkungan Pasar (<i>Inter Linkage Market</i>)... .. | 96 |
| | d. Partisipasi (<i>Participation</i>) | 97 |
| | e. Reduksi terhadap Risiko Ketidakpastian..... | 97 |
| | C. Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan | 98 |
| | D. Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan..... | 99 |
| | E. Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan..... | 101 |
| | F. Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia | 101 |
| | G. Koperasi dan Pembangunan Ekonomi Nasional | 104 |
| BAB VII | KOPERASI DAN NILAI-NILAI LOKAL..... | 107 |
| | A. Pengantar | 107 |
| | B. Pengalaman Proklamasi 17 Agustus 1945 | 108 |
| | C. Amanat Proklamasi 1945 | 109 |
| | D. Ekonomi Pancasila | 110 |
| | E. Nilai Koperasi Indonesia | 112 |
| | F. Varian Pengelolaan Koperasi Indonesia | 113 |
| BAB VIII | PENDAPATAN NASIONAL DALAM KERANGKA EKONOMI KERAKYATAN..... | 115 |
| | A. Pengantar | 115 |
| | B. Perdebatan Ekonomi Kerakyatan | 119 |
| BAB IX | KOPERASI DAN GLOBALISASI | 135 |
| | A. Pengantar | 135 |
| | B. Kualitas SDM dan Pertumbuhan Koperasi..... | 138 |

| | | |
|--------|--|-----|
| | C. Dorongan terhadap Peran Koperasi | 141 |
| | D. Beberapa Permasalahan Pengembangan Peran Koperasi | 142 |
| | E. Reposisi Peran Koperasi | 144 |
| BAB X | KOPERASI IDEAL | 151 |
| | A. Pengantar | 151 |
| | B. Fungsi Bisnis | 151 |
| | C. Fungsi Sosial | 156 |
| BAB XI | PERAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA | 167 |
| | A. Peran Koperasi dalam Kerangka Hukum | 167 |
| | 1. Aspek Umum | 167 |
| | 2. Aspek Khusus | 170 |
| | B. Pembangunan Ekonomi Indonesia | 172 |
| | 1. Aspek Umum | 172 |
| | 2. Aspek Khusus | 176 |
| | C. Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Indonesia | 177 |
| | 1. Aspek Umum | 177 |
| | 2. Aspek Khusus | 184 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 187 |
| | INDEX | 201 |



Dr. Romli Arsad, S.H., M.Hum., lahir di Muarameranjat Kab. Oganilir, Sumatera Selatan pada 20 Januari 1960. Ia menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Palembang, yakni SD Negeri, SMP Muhammadiyah, dan SMA Xaverius. Pendidikan tinggi diselesaikannya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, mulai Sarjana Fakultas Hukum (S-1) lulus 1985, Magister Humaniora (S-2) lulus 2001, dan Doktor Ilmu Hukum, lulus 2010.

Pekerjaannya di instansi pemerintah (PNS) diawali sebagai dosen APDN Palembang (1987 – 1992), kemudian Kasubbag TU Biro Pemda Provinsi Sumatera Selatan (1992 – 1993), dan kini Dosen IPDN Jatinangor (1993 – sekarang).

Dosen yang mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Tata Pemerintahan, dan Penanggulangan Korupsi ini beristrikan Ely Rosmiati, S.Sos. dan telah dikaruniai dua orang putra Drg. Printzdhan Wilovo Romel dan Elsa Maretha Putri Romel, S.IP.

Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 yang di dalamnya mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada 21 Oktober 1992 ini menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Meski telah berusia lebih dua dekade UU ini tetap berlaku, oleh karena UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang digadag-gadag sebagai penggantinya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Mei 2014 lalu karena bernuansa korporasi, menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi yang bertentangan dengan UUD 1945, tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Kontribusi koperasi di dalam konteks pembangunan ekonomi suatu bangsa, telah melahirkan pertanyaan parametris: “Seberapa besar kontribusi koperasi di dalam Gross National Product atau GNP”. Semakin besar kontribusi koperasi terhadap GNP, maka dapat disimpulkan seberapa besar peran koperasi sebagai wahana ekonomi. Kompleks besaran kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu bangsa berdasarkan parameter GNP, satu di antaranya berkolerasi langsung dengan aspek pengaturan atau perundang-undangan koperasi yang tepat, sehingga wahana ekonomi koperasi sebagai koperasi dapat beroperasi sesuai dengan karakternya, maka pembentukan perundang-undangan ekonomi koperasi harus memerhatikan karakteristik koperasi sebagai wahana ekonomi yang ditopang oleh teori ekonomi yang memiliki karakteristik tertentu pula.

Adalah sangat logis apabila kegagalan wahana koperasi dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, seringkali dikarenakan tidak terwujudnya aspek konsistensi, harmonisasi, sestetemisasi, dan sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Pembangunan koperasi di Indonesia yang tidak memberikan kontribusi signifikan atas GNP merupakan kasus yang patut dicermati secara seksama. Kajian di dalam buku ini berupaya menginventarisasi problematik koperasi terutama di Indonesia, khususnya berdasarkan sudut pandang yuridis, dan berupaya memberikan solusi berupa penemuan hukum yang didukung oleh karakteristik koperasi berdasarkan teori ekonomi koperasi yang juga memiliki karakteristik tertentu.

ISBN 979946276-2



9 789799 462763